

**KEBUTUHAN HUKUM DALAM PELAKSANAAN PENDIDIKAN KARAKTER DI  
PERGURUAN TINGGI**

**TESIS**

**Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan  
Memperoleh Derajat Gelar S-2  
Program Studi Magister Ilmu Hukum**



**Disusun oleh :**

**AGISTASARI ARSISTA**

**NIM : 201720380211014**

**DIREKTORAT PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG  
November 2019**

# KEBUTUHAN HUKUM DALAM PELAKSANAAN PENDIDIKAN KARAKTER DI PERGURUAN TINGGI

Diajukan oleh :

**AGISTASARI ARSISTA**  
**201720380211014**

Telah disetujui

Pada hari/tanggal. **Rabu/20 November 2019**

Pembimbing Utama

  
**Mokh.Najih, S.H., M.H., Ph.D**

Pembimbing Pendamping

  
**Dr.Haris Toffly, S.H., M.H**



**Mokh.Najih, S.H., M.H., Ph.D**

Ketua Program Studi  
Magister Ilmu Hukum

  
**Mokh.Najih, S.H., M.H., Ph.D**

# TESIS

Dipersiapkan dan disusun oleh :

**AGISTASARI ARSISTA**

201720380211014

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji  
pada hari/tanggal, Rabu/ 20 November 2019  
dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan  
memperoleh gelar Magister/Profesi di Program Pascasarjana  
Universitas Muhammadiyah Malang

## SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua	:	Mokh. Najih, S.H., M.H., Ph.D
Sekretaris	:	Dr. Haris Tofly, S.H., M.H
Penguji I	:	Dr. Herwastuti, S.H., M.Hum
Penguji II	:	Dr. Sulardi, S.H., M.H

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, karena rahmat dan hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis dengan judul : **“Kebutuhan Hukum Dalam Pelaksanaan Pendidikan Karakter di Perguruan Tinggi”**. Sholawat serta salm semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang telah menghantarkan dari zaman kegelapan hingga ke zaman yang terang benderang penuh dengan rahmat ini.

Penulisan hukum ini disusun dalam rangka memenuhi sebagian syarat memperoleh derajat gelar S-2 Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Dalam penyusunan tesis ini tentunya penulis mengalami beberapa hambatan, namun berkat bantuan, bimbingan dan kerjasama yang ikhlas dari berbagai pihak, akhirnya penulisan tesis ini dapat terselesaikan dengan baik. Pencapaian ini tidak terlepas dari jasa-jasa berbagai pihak, ungkapan terima kasih yang tulus penulis persembahkan kepada Papi tercinta Letkol.Echtijar Laksanadi, S.Sos., M.AP dan Mami tercinta Dra.Sis Suhartini dan adikku semata wayang Divo Rhega Arsistya, serta untuk keluarga besar yang telah memberikan support dan doa demi kelancaran penelitian ini. Kalian adalah kado terindah dalam hidup penulis.

Penulis menyadari sepenuhnya, bahwa dalam penyelesaian penyusunan tesis ini tidak lepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Untuk itu, penulis menghaturkan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada :

1. Bapak Drs.Fauzan, M.Pd., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Malang yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menempuh pendidikan di Universitas Muhammadiyah Malang hingga terselesaikan program Studi Magister Ilmu Hukum.
2. Bapak Akhsanul In'am, Ph.D., selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Malang.
3. Bapak Mokh. Najih, S.H., M.H., Ph.D., selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.
4. Bapak Mokh. Najih, S.H., M.H., Ph.D., selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Dr.Haris Tofly, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktu dan

kesempatan untuk membimbing, mengarahkan dan menyetujui dalam menyelesaikan tesis ini.

5. Seluruh Bapak dan Ibu dosen Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, yang selalu memberikan motivasi dalam menyelesaikan tesis ini.
6. Tata Usaha Direktorat Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Malang atas pelayanan administrasi.
7. Teman-teman seperjuangan Magister Ilmu Hukum angkatan 2017, terima kasih atas kebersamaannya selama ini.
8. Muhammad Fazri Yuhandi, S.T., atas bantuan, semangat, motivasi dan ilmunya dalam melakukan penulisan ini.
9. Orang-orang tercinta Etty Pujawanti, Shavira Pujawanti, Catresia Y.I.L, Zanuar Surya Prayugo, Lailatul Munawaroh, terima kasih atas semangat dan doanya.
10. Semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penelitian ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu

Akhir kata penulis memohon maaf sebesar-besarnya jika dalam penulisan tesis ini melakukan kesalahan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Semoga Tesis ini bermanfaat bagi semua pembaca pada umumnya dan bagi penulis khususnya.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Malang, 11 November 2019

Penulis



## DAFTAR ISI

Halaman Judul .....	i
Halaman Pengesahan .....	ii
Halaman Daftar Penguji.....	iii
Kata Pengantar .....	iv
Daftar Isi .....	vi
Daftar Tabel .....	viii
Surat Pernyataan .....	ix
Abstraksi .....	x
Abstract .....	xi
Latar Belakang .....	1
Rumusan Masalah.....	7
Tujuan Penulisan.....	7
Originalitas Penelitian.....	7
Kerangka Teori	
Tinjauan Umum tentang Pendidikan Karakter .....	9
Tinjauan Umum tentang Pendidikan Karakter di Perguruan Tinggi.....	10
Tinjauan Umum tentang Perguruan Tinggi.....	11
Tinjauan Umum tentang Peran Hukum dalam Masyarakat .....	12
Metode Penulisan	
Metode Pendekatan .....	13
Jenis Bahan Hukum.....	13
Bahan Hukum Primer .....	13
Bahan Hukum Sekunder .....	13
Bahan Hukum Tersier .....	13
Tehnik Pengumpulan Bahan Hukum .....	13
Tehnik Analisis Bahan Hukum .....	14
Hasil Penelitian dan Pembahasan .....	14
Pengaturan mengenai Pendidikan Karakter dalam Undang-Undang yang sedang berlaku serta Kekurangan dan Kelebihan Pengaturan	

Pendidikan Karakter di Perguruan Tinggi .....	14
Pengaturan yang Ideal Pada Pendidikan Karakter di Perguruan Tinggi .....	28
Penutup	
Kesimpulan.....	30
Saran.....	31
Daftar Pustaka.....	32



## DAFTAR TABEL

Tabel 1 : Latar Belakang Pendidikan Pelaku Korupsi .....	2
Tabel 2 : Peraturan Pendidikan Karakter .....	4
Tabel 3 : Penelitian Terdahulu.....	7
Tabel 4 : Kesesuaian Antara Jenis, Hierarki dan Materi Muatan .....	16
Tabel 5 : Penilaian Terhadap Materi Muatan Peraturan Perundang-Undangan .....	21
Tabel 6 : Analisis dan Evaluasi Hukum Berdasarkan Potensi Disharmoni Peraturan Perundang-Undangan.....	25
Tabel 7 : Kelebihan dan Kekurangan mengenai Pengaturan Pendidikan Karakter di Perguruan Tinggi .....	26





## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : **AGISTASARI ARSISTA**

NIM : **201720380211014**

Program Studi : **Magister Ilmu Hukum**

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. TESIS dengan judul : **KEBUTUHAN HUKUM DALAM PELAKSANAAN PENDIDIKAN KARAKTER DI PERGURUAN TINGGI** adalah karya saya dan dalam naskah Tesis ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.
2. Apabila ternyata dalam naskah Tesis ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur **PLAGIASI**, saya bersedia Tesis ini **DIGUGURKAN** dan **GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN**, serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
3. Tesis ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan **HAK BEBAS ROYALTY NON EKSklusif**.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 11 November 2019

Yang Menyatakan



**AGISTASARI ARSISTA**

## ABSTRAKSI

Nama : Agistasari Arsista  
Nim : 201720380211014  
Judul : Kebutuhan Hukum Dalam Pelaksanaan Pendidikan Karakter di Perguruan Tinggi  
Pembimbing : I. Mokh. Najih, S.H., M.H., Ph.D (NIDN : 0017056501)  
II. Dr. HarisTofly, S.H., M.H (NIDN : 0013076701)  
Email : arsistaagista@gmail.com

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mendalami tentang pengaturan hukum pendidikan karakter di perguruan tinggi. Adapun yang menjadi fokus analisis dalam mengenai peraturan pendidikan karakter beserta kekurangan dan kelebihan peraturan pendidikan karakter di perguruan tinggi serta pengaturan yang ideal pada pendidikan karakter di perguruan tinggi. Metodologi yang digunakan dalam kajian ini adalah metode dengan pendekatan yuridis normative dengan data primer, sekunder dan tersier yang dianalisis dengan menggunakan metode studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kelebihannya yaitu Peraturan mengenai pendidikan karakter di perguruan tinggi sudah jelas diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 87 Pasal 1 Ayat (1) Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter yang menjelaskan bahwa penguatan pendidikan karakter. Kelemahan yaitu Peraturan mengenai pendidikan karakter di perguruan tinggi itu sendiri tidak semua perguruan tinggi menerapkan sistem pendidikan karakter disetiap mata kuliah ataupun program kemahasiswaan. Pengaturan yang ideal pada pendidikan karakter di perguruan tinggi yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Pasal 84 Ayat (2) menyebutkan bahwa perguruan tinggi memiliki tujuan membentuk insan yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berkepribadian luhur, sehat, berilmu dan cakap, kritis, kreatif, inovatif, mandiri, percaya diri dan berjiwa wirausaha serta toleran, peka sosial dan lingkungan, demokratis dan bertanggung jawab.

Saran Untuk Pemerintah, bahwa peraturan mengenai pendidikan karakter yang diatur di dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1 dan Peraturan Presiden Nomor 87 Pasal 1 Ayat (1) Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter belum dilaksanakan dengan baik oleh seluruh perguruan tinggi yang ada di Indonesia. Oleh karena itu, dianjurkan adanya sanksi hukum bagi perguruan tinggi yang tidak menerapkan program mata kuliah mengenai pendidikan karakter apabila adanya sanksi hukum maka seluruh perguruan tinggi yang ada di Indonesia akan membuat program mata kuliah mengenai pendidikan karakter. Untuk perguruan tinggi, adanya kesadaran diri dalam perguruan tinggi untuk menerapkan program mata kuliah mengenai pendidikan karakter. Untuk peserta didik, adanya perubahan dalam kehidupan di dalam ataupun di luar kampus.

**Kata Kunci :** Kebutuhan Hukum, Pendidikan Karakter, Perguruan Tinggi

## ABSTRACT

Name : Agistasari Arsista  
NIM : 201720380211014  
Title : Legal needs in the implementation of character education in college High  
Advisors : I. Mokh. Najih, S.H., M.H., Ph.D (NIDN : 0017056501)  
II. Dr. HarisTofly, S.H., M.H (NIDN : 0013076701)  
Email : arsistaagista@gmail.com

The purpose of this research is to deepen the legal arrangement of character education in universities. The focus is on the analysis of Character education regulations and the lack and excess rules of character education in universities and the ideal arrangement of character education in colleges. The methodology used in this study is a method with a normative juridical approach with primary, secondary and tertiary data analyzed using the literature study method. The results showed that the surplus is the regulation on character education in college is clearly stipulated in the Presidential Regulation No. 87 Article 1 paragraph (1) year 2017 on strengthening of character education explaining that strengthening character education. Weakness is the regulation of character education in the college itself not all universities apply character education system in every course or student program. The ideal arrangement for character education in college is government Regulation No. 17 year 2010 Article 84 clause (2) mentions that the college has the purpose of forming human faith and fear to the Almighty God, moral Noble and personality of noble, healthy, knowledgeable and capable, critical, creative, innovative, independent, confident and entrepreneurial spirit as well as tolerant, socially and environmentally sensitive, democratic and responsible.

Advice for the Government, that the rules on the character education set forth in the National Education System Act No. 20 year 2003 Article 1 and Presidential Regulation No. 87 Article 1 paragraph (1) year 2017 on strengthening character education Performed well by all universities in Indonesia. Therefore, it is recommended that there is legal sanctions for universities that do not implement courses program on character education if the sanction of law then all the universities in Indonesia will make courses About character Education. For college, there is self-awareness in college to implement courses program on character Education. For learners, there is a change in life on or off campus.

**Keywords:** Need for Legal, Educative, College

## A. Latar Belakang

Pendidikan karakter saat ini dan mungkin beberapa tahun kedepan sedang “ngetrend” dan “booming” itu tidak lepas dari gemparnya sosialisasi yang dilakukan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, sebagai upaya memperbaiki karakter generasi muda pada bangsa ini pada umumnya. Dampak globalisasi yang terjadi saat ini membawa masyarakat Indonesia melupakan pendidikan karakter bangsa. Sungguh, pendidikan karakter merupakan suatu kekuatan bangsa yang sangat penting dan perlu diajarkan sejak dini kepada anak-anak.<sup>1</sup> Di Indonesia pelaksanaan pendidikan karakter saat ini memang dirasakan mendesak. Pendidikan karakter di Indonesia dirasakan amat perlu pengembangannya bila mengingat makin meningkatnya pergaulan bebas, seperti narkoba, minum-minuman keras, seks bebas lainnya terutama kota-kota besar, pemerasan/kekerasan (*bullying*), kecenderungan dominasi senior terhadap junior.<sup>2</sup> Pendidikan karakter di Indonesia untuk membangun karakter bangsa yang bermartabat mengusung semangat baru dengan optimism. contoh hilangnya kejujuran dimasyarakat Indonesia seperti maraknya fenomena korupsi dan kolusi sudah amat banyak, seakan-akan dalam dunia pendidikan kejujuran telah menjadi barang yang langka. Keprihatinan ini telah menjadi keprihatinan nasional, presiden Republik Indonesia menyampaikan dalam pidatonya “Pembangunan watak amat penting”. Kita ingin membangun manusia Indonesia yang berakhlak, berbudi pekerti dan berperilaku baik. Bangsa kita ingin pula memiliki peradaban yang unggul dan mulia”. Mutiara kehidupan satu-satunya yang paling berharga sirna selamanya.<sup>3</sup> Jumlah kasus korupsi di Indonesia terus meningkat, kasus korupsi yang telah diuputus oleh Mahkamah Agung (MA) dari 2018-2019 sebanyak 1.109 kasus dan terdakwa korupsi 967.<sup>4</sup> Badan Pusat Statistik (BPS) dalam Statistik Kriminal 2018 mencatat terjadi 336.652 tindak kejahatan di Indonesia. Jumlah orang yang mengalami tindak kejahatan per 100ribu penduduk mencapai 129 orang. Provinsi yang melaporkan jumlah tindak kejahatan terbanyak terdapat di Sumatera Utara sebanyak 39.867 kasus Ibukota Indonesia, DKI Jakarta menempati posisi selanjutnya dengan angka kejahatan yang dilaporkan ke Metro Jaya sebanyak 34.767 kasus, sementara itu, provinsi yang melaporkan tindak kejahatan paling sedikit adalah Maluku sebanyak 789 kasus dan Sulawesi Barat sebanyak 1.841 kasus. Di tahun 2019 tercatat hingga bulan Mei ada 236 kasus kejahatan seksual di Indonesia.

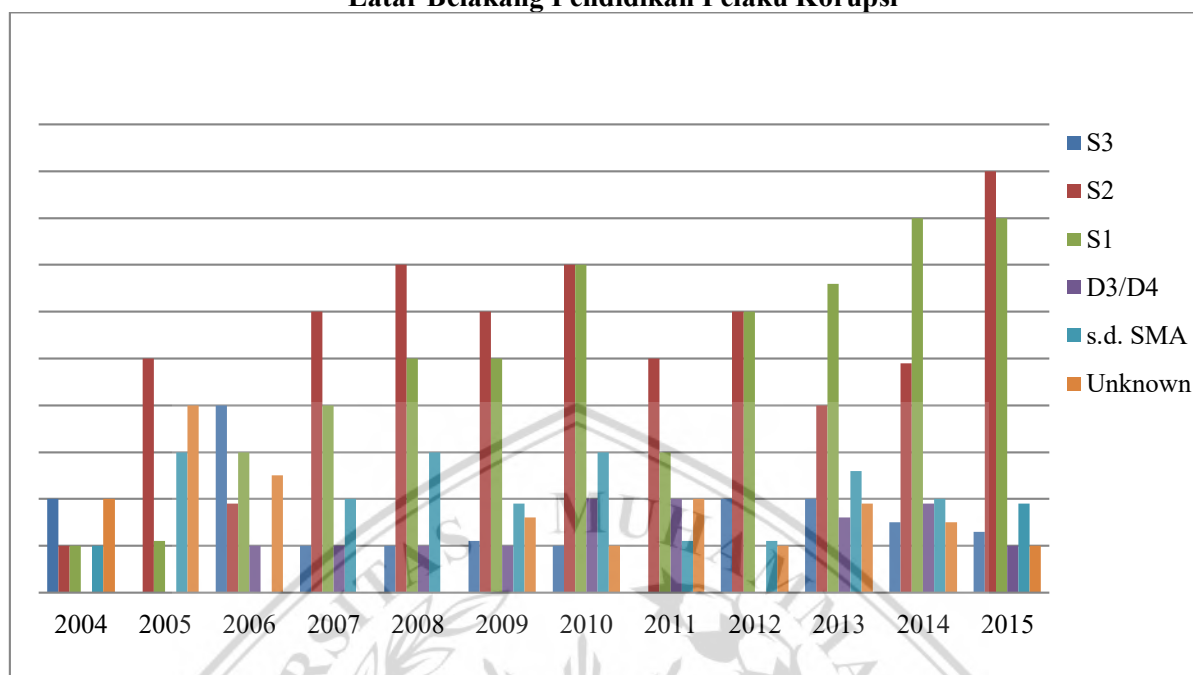
<sup>1</sup> Muslich, Mansur. 2013. *Pendidikan Karakter Menjawab Tantangan Krisis Multidimensional*. Jakarta: PT Bumi Aksara.

<sup>2</sup> Samani, Muchlas dan Hariyanto. 2011. *Konsep dan Model Pendidikan Karakter*. Bandung: PT Remaja Rodakarya.

<sup>3</sup> *Ibid.*,

<sup>4</sup> *Laboratorium Ilmu Ekonomi, Departemen Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Gadjah Mada*

**Tabel 1**  
**Latar Belakang Pendidikan Pelaku Korupsi<sup>5</sup>**



Dari data diatas menunjukkan bahwa kurangnya pendidikan moral di Indonesia. Pendidikan di Indonesia pada umumnya mengedepankan pendidikan formal tapi mengesampingkan pendidikan karakter. Banyak orang-orang yang pintar tapi tidak memiliki akhlak yang baik akibatnya banyak orang-orang pintar terjerat kasus, terutama yang menjadi perhatian bangsa Indonesia saat ini adalah kasus korupsi yang meningkat setiap tahunnya. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 3 menjelaskan fungsi pendidikan nasional adalah mengembangkan kemampuan dan membentuk kecerdasan kehidupan bangsa dan tujuan pendidikan nasional, watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, menjadi warga negara yang demokratis, bertanggung jawab sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri. Implikasi dari Undang-Undang tersebut bahwa, pendidikan disetiap jenjang termasuk Perguruan Tinggi harus diselenggarakan secara terprogram dan sistematis mengarah kepada pencapaian tujuan pendidikan nasional. Melihat fenomena-fenomena dunia pendidikan saat ini, bisa dikatakan sistem pendidikan nasional sudah gagal memenuhi tujuan undang-undang tersebut. Perguruan tinggi yaitu salah wahana efektif dalam internalisasi pendidikan karakter terhadap peserta didik.<sup>6</sup> Penyelenggaraan pendidikan karakter di perguruan tinggi berpedoman kepada nilai-nilai karakter dasar yang dikembangkan menjadi nilai-nilai yang lebih banyak (bersifat tidak relative) sesuai dengan

<sup>5</sup> Data Primer Diolah

<sup>6</sup> Syamsul Kurniawan. 2013. *Pendidikan Karakter: Konsepsi dan Implementasinya secara Terpadu di Lingkungan Keluarga, Sekolah Perguruan Tinggi dan Masyarakat*. Yogyakarta : Ar-Ruzz Media.

kebutuhan, kondisi dan lingkungan perguruan tinggi itu sendiri.<sup>7</sup>Pendidikan karakter adalah proses pemberian tuntutan kepada peserta didik untuk menjaadi manusia seutuhnya yang berkarakter dalam dimensi hati,pikir,raga, serta rasa dan karsa.<sup>8</sup>Saat ini pendidikan karakter dan budaya bangsa tengah mengalami berbagai permasalahan diantaranya belum terhayatinya nilai-nilai Pancasila, bergesernya nilai-nilai kehidupan, memudarnya nilai-nilai budaya bangsa, melebahnya budaya bangsa dampak dari masuknya beragam budaya luar yang kurang sesuai dengan karakter bangsa. Akibatnya banyak terjadi kasus-kasus yang saat ini mengemuka di media massa, yakni kekerasan, tawuran, pornografi dan narkoba. Oleh karena itu, perlu dikembangkan pendidikan karakter dan rasa nasionalisme, karena pendidikan masih menjadi sarana yang paling efektif untuk membentuk karakter bangsa dan masyarakat yang sesungguhnya. Pendidikan sebagai motor perbaikan dan pembentukan karakter bangsa. Berdasarkan hal tersebut, memang seakan sistem pendidiikan nasional berhasil dengan presentase tujuh puluh sembilan persen tingkat kecerdaasan tetapi itu tidak diiikuti dengan tinggginya presentase karakter jiiwa peserta didiik,seperti kepekaaan,percaya diri,bahkan kepemimpinan. Dalam Pasal 4 Pemendikbud Nomor 20 Tahun 2018 dinyatakan bahwa :

1. Penyelenggaraan PPK pada TK bertujuan untuk menanamkan nilai karakter dalam pelaksanaan pembelajaran.
2. Penyelenggaraan PPK pada satuan pendidikan jenjang pendiidkan dasar memiliki muatan karakter yang lebih besar dibandingkan dengan muatan karakter dalam penyelenggaraan PPK pada satuan pendidikan jenjang pendidikan menengah.
3. Muatan karakter dalam penyelenggaraan PPK diimplementasikan melalui kurikulum dan pembiasaan pada satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar atau satuan pendidikan jenjang menengah.

Kebijakan dan prioritas pada pembangunan, pendidikan karakter tidak terpisahkan dari upaya mencapai Visi dari Pembangunan Nasional yang tertuang pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPN) Tahun 2005-2025, yaitu “Membina dan mengeembangkan karkter warga negara sehingga mampu mewujudkan masyarakat yang ber-Ketuhanan Yang Maha Esa, ber-Kemanusiaan yang adil dan beradab, Berjiwa Persatuan Indonesia, Berjiwa Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan dan Keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia.” Pendidikan nasional bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab. Pendidikan dasar bertujuan membangun landasan bagi berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, Berakhlak mulia dan berkepribadian luhur, Berilmu, cakap, kritis, kreatif dan

---

<sup>7</sup> Fatturohman, Pupuhdkk.2013.*Pengembangan Pendidikan Karakter*.Bandung: PT.RefikaAditama.

<sup>8</sup>*Ibid.*,



inovatif, Sehat, mandiri dan percaya diri, Toleran, peka sosial, demokratis dan bertanggungjawab.<sup>9</sup>

Bidang pendidikan mengenai pengutaaan metodologi dan kurikulum, yakni Penyempurnaan kurikulum dan metode pembelajaran aktif berdasarkan nilai-nilai budaya bangsa untuk membantu daya saing dan karakter bangsa dan terimplementasinya uji coba kurikulum dan metode pembelajaran aktif berdasarkan nilai-nilai budaya bangsa untuk membentuk daya saing karakter dan karakter bangsa.<sup>10</sup> Dasar hukum dalam pembinaan pendidikan karakter diantaranya :

1. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 3 Ayat (2) Amandemen Kedua;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 3 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Pasal 17 Ayat (3) tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Pasal 1 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Undang-Undang Nomor 12 Pasal 1 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 139 Pasal 3 Ayat (1) Tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Pasal 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Pasal 4 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Pasal 3 Ayat (1,2,3) dan Pasal 11 Ayat (1) Tahun 2015 tentang Standar Pendidikan Nasional Pendidikan Tinggi.
10. Peraturan Presiden Nomor 87 Pasal 1 Ayat (1) Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter;
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 50 Pasal 28 Ayat (4) dan Pasal 28 Ayat (5) Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Pendidikan Nasional Pendidikan Tinggi.

**Tabel 2**  
**Peraturan pendidikan karakter :<sup>11</sup>**

No	Peraturan	Pasal	Isi	Sesuai/Tidak Sesuai
1	Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen keempat	Pasal 31 Ayat (3) Bab XIII Pendidikan dan Kebudayaan	Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak yang mulia dalam kerangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang mengatur dengan undang-undang.	Sesuai

<sup>9</sup>Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Pasal 17 ayat 3 tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan.

<sup>10</sup>INPRES Nomor 1 tahun 2010 dalam Bidang Pendidikan mengenai Penguatan Metodologi dan Kurikulum.

<sup>11</sup> Data Primer diolah

		an		
2	Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional	Pasal 3	Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab.	Sesuai
3	Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan	Pasal 17	Gubernur bertanggungjawab mengelola sistem pendidikan nasional di daerahnya serta merumuskan dan menetapkan kebijakan daerah bidang pendidikan sesuai kewenangannya.	Tidak Sesuai
4	Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan	Pasal 1	Pengelolaan pendidikan adalah pengaturan kewenangan dalam penyelenggaraan sistem pendidikan nasional oleh penerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten.kota, penyelenggara pendidikan yang didirikan masyarakat dan satuan pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.	Tidak Sesuai
5	Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 139 Tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi	Pasal 3 Ayat (1)	Statuta merupakan peraturan dasar pengelolaan suatu perguruan tinggi yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di perguruan tinggi yang bersangkutan.	Sesuai
6	Peraturan Pemerintah nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi	Pasal 4 Ayat (1)	Dalam melaksanakan tanggung jawab dibidang pengaturan sebagaimana dimaksud dalam, Pasal 3 huruf a meengenai peengaturan, Meenteri meemiliki tugas dan wewenang mengatur mengenai:a.sistem pendidikan tinggi, b.anggaran pendidikan tinggi, c.haak mahasiswa, d.akses yyang berkeeadilan, e.muttu peendidikan tinggi, f.relevansi hasil pendidikan tinggi, g.ketersedian perguruan tinggi.	Sesuai
7	Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005tentang Standar	Pasal 4	Standar nasional pendidikan bertujuan menjamin mutu pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat.	Sesuai

	Nasional Pendidikan			
8	Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter	Pasal 1 Ayat (1)	Pengutan pendidikan karakter yang selanjutnya disingkat PPK adalah gerakan pendidikan di bawah tanggung jawab satuan pendidikan untuk memperkuat karakter peserta didik melalui harmonisasi hati, rasa, pikir, dan raga dengan pelibatan dan kerja sama antara satuan pendidikan, keluarga dan masyarakat sebagai bagian dari Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM).	Tidak Sesuai
9	Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Pendidikan Nasional	Pasal 66 Huruf (A)	Pasal 7 Ayat (3) yang belum dikaji dan ditetapkan oleh menteri, perguruan tinggi dapat menggunakan rumusan pengetahuan dan keterampilan kusus yang disusun secara mandiri untuk proses penjamin mutu internal di perguruan tinggi dan proses penjamin mutu eksternal melalui akreditasi.	Sesuai

Tujuan pendidikan yang mencakup tiga dimensi yaitu dimensi ketuhanan, pribadi dan social. Artinya, pendidikan bukan diarahkan pada pendidikan yang sekuler, bukan pada pendidikan individualistik, dan bukan pula pada pendidikan sosialistik. Tapi pendidikan yang diarahkan di Indonesia itu adalah pendidikan yang menjadi tujuan pendidikan ini tak menjadikan pendidikan yang sekuler. Karena dalam pendidikan sekuler, agama hanya dijadikan sebagai salah satu mata kuliah tanpa menjadikannya dasar dari ilmu yang diterapkan didalam kehidupan sehari-hari. Orang sering terjebak, pendidikan karakter itu diterjemahkan hanya sebagai sopan santun. Padahal lebih dari itu yang mau dibangun adalah karakter-karakter yang menumbuhkan kepenasaran intelektual sebagai modal untuk mengembangkan kreativitas dan daya inovatif yang dijiwai dengan nilai kejujuran dan dibingkai dengan kesopanan dan kesantunan.

Kondisi dimana hukum Republik Indonesia belum mengatur tegas mengenai keharusan pendidikan karakter di perguruan tinggi. Beberapa perguruan tinggi sebagian besar belum menerapkan sistem pendidikan karakter. Berakaitan dengan dirasakan semakin mendesaaknya implementasi pendidikan karakter di Indonesia, Pusat Kurikulum Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan Nasional dalam publikasinya berjudul "Pedoman Pelaksanaan Pendidikan Karakter" menyatakan bahwa pendidikan karakter pada intinya bertujuan membentuk bangsa yang tangguh, kompetitif, berakhlak mulia, bermoral, bertoleran, bergotong royong, berjiwa patriotik, berkembang dinamis, berorientasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang

seemuanya dijiwai oleh iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa berdasarkan Pancasila.<sup>12</sup> Pendidikan karakter merupakan keharusan yang harus diterapkan melihat kondisi disintegrasi bangsa kita yang semakin merebak, membuat harus segera dilakukan langkah preventif sejak dini, terutama di lingkungan perguruan tinggi. Pemerintah mengharapkan lingkungan perguruan tinggi sebagai bagian terpenting dalam pendidikan karakter. Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis mengambil judul penelitian yaitu **“Kebutuhan Hukum dalam Pelaksanaan Pendidikan Karakter di Perguruan Tinggi”**.

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis merumuskan beberapa masalah, sebagai berikut :

1. Bagaimana peraturan mengenai pendidikan karakter serta kekurangan dan kelebihan pengaturan pendidikan karakter di perguruan tinggi?
2. Bagaimana pengaturan yang ideal pada pendidikan karakter di perguruan tinggi?

## C. Tujuan

Adapun tujuan penelitian ini, adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui peraturan mengenai pendidikan karakter serta kekurangan dan kelebihan pengaturan pendidikan karakter di perguruan tinggi.
2. Untuk mengetahui pengaturan yang ideal pada pendidikan karakter di perguruan tinggi.

## D. Originalitas Penelitian

Untuk mengetahui originalitas atau keaslian peneliti, untuk itu penulis, memaparkan penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang penulis lakukan. Penelitian terdahulu bertujuan sebagai alat pembandingan bagi peneliti dalam sebuah penelitian yang akan atau sedang dilakukan, sehingga mengetahui kekurangan maupun kelebihan penelitian yang dilakukan oleh penulis tersebut. Sehingga kita dapat membandingkan penelitian kita dengan penelitian orang lain. Selain hal tersebut, dengan adanya penelitian terdahulu dapat terlihat dan kita bisa menyimpulkan bahwa perbedaan substansial yang membedakan antara penelitian yang satu dengan yang lainnya. Diantaranya penelitian terdahulu, adalah sebagai berikut :

**Table 3**  
**Penelitian Terdahulu<sup>13</sup>**

No	Nama dan Judul	Jurnal	Rumusan Masalah	Hasil Penelitian
1	Sesmiyanti Rindila Persepsi mahasiswa tentang pendidikan karakter pada buku teks reading di perguruan tinggi swasta.	<i>Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra</i> , Volume 7, Nomor 2, Januari 2018.	1. Bagaimana dosen yang telah mengajar pada mata kuliah reading dan mahasiswa yang telah mengikuti mata kuliah tersebut? 2. Apa buku teks yang digunakan pada mata kuliah reading di STKIP PGRI Sumatera Barat?	Buku teks yang digunakan tersebut belum mengandung nilai pendidikan karakter yang harus dipelajari dan dibutuhkan oleh mahasiswa, buku teks tersebut hanya mengandung Sembilan nilai pendidikan karakter dari 18 nilai yang terdapat pada Permendikbud.

<sup>12</sup>Samani, Muchlass dan Harriyanto. 2011. *Konsep dan Model Pendidikan Karakter*. Bandung.: PT Reemaja Roodakarya.

<sup>13</sup> Data Primer Diolah

2	Ida Bagus Rai Implementasi pendidikan karakter di perguruan tinggi.	<i>e Jurnal Undwi</i> , Volume 28, Nomor 2, Oktober 2016	1. Bagaimana pelaksanaan kegiatan belajar mengajar? 2. Bagaimana pelaksanaan kegiatan pembiasaan keseharian yang ada di kampus?	Mengintegrasikan dalam kegiatan belajar mengajar melalui berbagai mata kuliah baik secara parsial maupun terpadu dalam kelompok tertentu. Kegiatan pembiasaan keseharian yang ada di kampus melalui pengembangan budaya atau kultur kampus untuk pengembangan pendidikan karakter.
3	Tri Astutik Haryati Pendidikan karakter di STAIN Pekalongan.	<i>Jurnal Penelitian</i> , Volume 10, Nomor 1, Mei 2013.	1. Bagaimana peran kelembagaan pekalongan ? 2. Bagaimana sistem pembelajaran di STAIN Pekalongan ? 3. Apa program-program pengabdian masyarakat yang sedang dijalankan oleh STIN Pekalongan dalam mengembangkan pendidikan karakter ?	Memiliki nilai akademis dalam bidang Pendidikan Agama Islam, hal ini dikarenakan Pendidikan Agama Islam bertujuan untuk pembentukan akhlak yang mulia, nilai praktis karena dapat memperkaya khazanah pemikiran Islam ditanak air serta dapat dijadikan pedoman dalam melakukan pembentukan karakter bangsa Indonesia, nilai social terutama merespons kondisi social-kultural masyarakat Indonesia yang sudah sangat mengkhawatirkan dengan merebaknya dekadensi moral dan dehumanisasi disegala lapisan masyarakat.
4	Devi Sykri Azhari Peran dosen dalam mengembangkan karakter mahasiswa.	<i>Jurnal Pelangi</i> , Volume 9, Nomor 2, Juni 2017	1. Bagaimana melaksanakan tugas utama Tri Dharma Perguruan Tinggi ? 2. Bagaimana peran dosen dalam mengembangkan pendidikan karakter ?	Tugas utama Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu melakukan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, seorang dosen melakukan proses internalisasi nilai-nilai luhur yang kemudian menjadi budaya kampus. Dosen tidak hanya mengajar materi pembelajaran saja akan tetapi juga dapat menjadi panutan dan juga contoh dalam karakter serta mampu membuka mata hati para mahasiswa.
5	Hasan Suryono Kebijakan hukum penataan kurikulum mata kuliah pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi guna revolusi karakter mentaati hukum bagi mahasiswa.	<i>Jurnal Ilmiah Pancasila dan Kewarganegaraan</i> , Volume 1, Nomor 2, Desember 2016.	1. Bagaimana tahapan konsep menyusun kurikulum mata kuliah kewarganegaraan ? 2. Apa yang dapat meningkatkan kesadaran dan ketataan pada hukum ?	Merekonstruksikan kurikulum kajian kewarganegaraan diperlukan adanya penetapan visi, misi dan tujuan mata kuliah kewarganegaraan, adanya toleransi yang sistematis antara profil lulusan dengan kompetensi.

6	Janrico M.H Manalu Pendidikan karakter terhadap pembentukan perilaku mahasiswa (Studi kasus proses pendidikan karakter dalam hmj sosiologi universitas mulawarman kaltim).	e Jurnal, Volume 2, Nomor 4 , April 2014.	1. Bagaimana pembentukan pendidikan karakter terhadap perilaku mahasiswa ? 2. Bagaimana proses pendidikan karakter dalam hmj sosiologi unmul ?	Pendidikan karakter tidak dimasukkan dalam program kegiatan namun hmj membuat kegiatan yang dirancang seluruh anggota yang melibatkan mahasiswa secara umum melalui (badan komite kelas) dimasukkan agar setiap mahasiswa jurusan sosiologi yang bergabung dalam hmj maupun tidak memiliki tanggungjawab terhadap apa yang telah direncanakan bersama yang secara tidak langsung akan membentuk karakter mahasiswa.
7	Taufiqurrahman Pembentukan karakter mahasiswa dalam system pendidikan tinggi.	Tadris, Volume 13, Nomor 1, Juni 2018.	1. Mengidentifikasi pembentukan karakter mahasiswa oleh tenaga pendidik ? 2. Hasil pembentukan karakter mahasiswa dalam system pendidikan tinggi ?	Tenaga pendidik (dosen) maupun tenaga kependidikan pada perguruan tinggi keagamaan islam negeri (PTKIN) agar hasil-hasil penelitian ini dijadikan feedback tentang karakter mahasiswa yang didiknya untuk memberikan landasan yang kuat dalam penyajian layanan pendidikan secara lebih baik berdasarkan karakter yang terdepan secara jelas.
8	Patry Agung Pengembangan model pendidikan karakter peduli social melalui metode bermain peran di Universitas Bandar Lampung.	Jurnal Laksana-Pendidikan, Volume 1, Nomor 2, Desember 2018.	1. Bagaimana kondisi dan potensi untuk dikembangkannya model pendidikan karakter melalui metode bermain peran di Universitas Bandar Lampung ? 2. Bagaimana model pendidikan karakter peduli social melalui metode bermain peran di Universitas Bandar Lampung.	Adanya peningkatan nilai-nilai karakter peduli social selama dilingkungan sekolah. Hasil dari analisis deskripsi yang memperlihatkan aspek penilaian anak dengan penilaian awal yaitu 65,63% mahasiswa dalam criteria cukup dan 18,75% mahasiswa dalam criteria baik.

Beberapa penelitian terdahulu diatas secara garis besar membahas tentang pelaksanaan pendidikan karakter di pendidikan tinggi. Tetapi yang membedakan dengan penelitian saya, membahas terkait dengan kebutuhan hukum dalam pelaksanaan pendidikan karakter di perguruan tinggi.

## E. Kerangka Teori

### 1. Tinjauan Umum tentang Pendidikan Karakter

Pengertian karakter menurut Pusat Bahasa Depdiknas adalah “bawaan” hati, jiwa, kepribadian, budi pekerti, perilaku, personalitas, sifat, tabiat, tempramen, watak”. Adapun karakter adalah berkepribadian, berperilaku, bersifat, bertabiat dan berwatak”. Karakter mengacu kepada serangkaian sikap (*attitudes*), perilaku (*behaviors*), motivasi (*motivations*), dan keterampilan (*skills*). Karakter berasal dari bahasa Yunani yang berarti “to mark” atau menandai dan memfokuskan bagaimana mengaplikasikan nilai kebaikan dalam bentuk tindakan atau tingkah laku, sehingga orang yang tidak jujur, kejam, rakus dan perilaku jelek lainnya, dikatakan orang yang berkepribadian jelek,



sebaliknya, orang yang perilakunya sesuai dengan kaidah moral disebut dengan berkarakter mulia. Individu yang berkarakter baik atau unggul adalah seseorang yang berusaha melakukan hal-hal yang terbaik terhadap Tuhan Yang Maha Esa, dirinya, sesama, lingkungan, bangsa dan negara serta dunia internasional pada umumnya dengan mengoptimalkan potensi (pengetahuan) dirinya dan disertai dengan kesadaran, emosi dan motivasinya (perasaannya). Pendidikan karakter adalah suatu system penanaman nilai-nilai karakter kepada warga di lingkungan pendidikan yang meliputi komponen pengetahuan, kesadaran atau kemauan, dan tindakan untuk melaksanakan nilai-nilai tersebut. Dalam pendidikan karakter di lingkungan perguruan tinggi semua komponen harus dilibatkan, termasuk komponen-komponen pendidikan itu sendiri yaitu kurikulum, proses pembelajaran dan penilaian, penanganan atau pengelolaan mata kuliah, pengelolaan di lingkungan perguruan tinggi, pelaksanaan aktivitas atau kegiatan di lingkungan perguruan tinggi, pemberdayaan sarana dan prasarana, pembiayaan dan etos kerja seluruh warga di lingkungan perguruan tinggi.

Pendidikan karakter dimaknai sebagai suatu perilaku warga di perguruan tinggi yang dalam penyelenggaraan pendidikan harus berkarakter.<sup>14</sup> Dosen membantu membentuk karakter peserta didik. Hal ini mencakup keteladanan bagaimana perilaku dosen, cara dosen berbicara atau menyampaikan materi, bagaimana dosen bertoleransi dan berbagai hal terkait lainnya. Pendidikan karakter memiliki esensi dan makna yang sama dengan pendidikan moral dan pendidikan akhlak. Pendidikan karakter berpijak dari karakter dasar manusia yang bersumber dari nilai moral universal yang bersifat absolut bersumber dari agama. Nilai-nilai karakter dasar yaitu cinta kepada Allah dan Ciptaan-Nya (alam dengan isinya), tanggungjawab, jujur, hormat, keras dan pantang menyerah, keadilan dan kepemimpinan. Penyelenggaraan pendidikan karakter di perguruan tinggi harus berpijak pada nilai-nilai karakter dasar yang selanjutnya dikembangkan menjadi nilai-nilai yang lebih banyak kebutuhan, kondisi dan lingkungan perguruan tinggi itu sendiri. Dewasa ini banyak pihak yang menuntut peningkatan intensitas dan kualitas pelaksanaan pendidikan karakter pada lembaga pendidikan formal.

## **2. Tinjauan Umum tentang Pendidikan Karakter di Perguruan Tinggi**

Pendidikan karakter di perguruan tinggi, semua komponen harus dilibatkan, termasuk komponen-komponen pendidikan itu sendiri, yaitu isi kurikulum, proses pembelajaran dan penilaian, kualitas hubungan, penanganan atau pengelolaan mata kuliah, pengelolaan perguruan tinggi, pelaksanaan aktivitas atau kegiatan di lingkungan perguruan tinggi, pemberdayaan sarana dan prasarana, pembiayaan dan etos kerja seluruh warga di lingkungan perguruan tinggi. Pembinaan karakter juga termasuk dalam materi yang harus diajarkan dan dikuasai serta direalisasikan oleh peserta didik dalam kehidupan sehari-hari. Upaya untuk meningkatkan kesesuaian dan mutu pendidikan karakter, Kementerian Pendidikan Nasional mengembangkan rancangan mengenai pendidikan karakter untuk setiap jalur, jenjang dan jenis satuan pendidikan. Konfigurasi karakter dalam konteks totalitas proses psikologis dan sosial-kultural tersebut

---

<sup>14</sup> Fadjar Malik, 2004, *Sintesa Antara Perguruan Tinggi dengan Pesantren; Upaya Menghadirkan Wacana Pendidikan Alternatif*, Malang: UIN Press

dikelompokkan dalam olah hati, olah pikir, olah raga dan kinestetik dan olah rasa dan karsa.

Pada Undang-Undang Nomor 20 Pasal 13 Ayat (1) Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa jalur pendidikan terdiri atas pendidikan formal, nonformal dan informal yang dapat saling melengkapi dan memperkaya. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan. Pendidikan informal sesungguhnya memiliki peran dan kontribusi yang sangat besar dalam keberhasilan pendidikan. Kegiatan ekstrakurikuler merupakan kegiatan pendidikan diluar mata kuliah untuk membantu pengembangan peserta didik sesuai dengan kebutuhan, potensi, bakat dan minat mereka melalui kegiatan secara khusus diselenggarakan oleh pendidik atau tenaga kependidikan yang berkemampuan dan berkewenangan di perguruan tinggi. Pengelolaan tersebut antara lain nilai-nilai yang perlu ditanamkan, muatan kurikulum, pembelajaran, penilaian, pendidik dan tenaga kependidikan serta komponen terkait lainnya. Dengan demikian, manajemen perguruan tinggi merupakan salah satu media yang efektif dalam pendidikan karakter di perguruan tinggi.

### 3. Tinjauan Umum tentang Perguruan Tinggi

Pendidikan telah ada sejak lama, sejak manusia pertama kali diciptakan dan terus berkembang dengan berbagai macam cara baik secara informal ataupun secara formal. Sejalan dengan perkembangan zaman, pendidikan formal dilakukan dengan terstruktur atau bertingkat sesuai dengan usia belajar seseorang. Secara umum ada beberapa jenjang atau tingkatan pendidikan berdasarkan usia belajar seseorang, yang terbagi atas Sekolah Dasar (*Elementary School*), yaitu usia 6-12 tahun, Sekolah Menengah Pertama (*Junior High School*), yaitu usia 13-15 tahun, Sekolah Menengah Atas (*Senior High School*), yaitu usia 16-18 tahun, Perguruan Tinggi (*University/Academic Institution/Higher Education*), yaitu usia 19-.. tahun. Kebebasan dan keinginan belajar menjadi cirri utama yang membedakan antara pendidikan tinggi dengan pendidikan sebelumnya. Perguruan tinggi adalah sebagai jenjang pendidikan formal tertinggi yang mempunyai system belajar dan mengajar yang berbeda dengan jenjang sebelumnya. Perguruan tinggi terdiri atas akademik, institute dan sekolah tinggi. Perguruan tinggi merupakan kelanjutan dari pendidikan menengah yang diselenggarakan untuk menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan/atau profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan dan/atau menciptakan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian.<sup>15</sup> Keberhasilan seseorang dalam jenjang perguruan tinggi ini sangat dipengaruhi oleh motivasi dan keinginannya untuk menjadi lebih baik daripada yang lain. Dari uraian diatas jenjang pendidikan atau tingkat-tingkat yang ada pada pendidikan formal dimengerti bahwa pendidikan merupakan proses yang berkelanjutan. Oleh karena itu setiap jenjang atau tingkat pendidikan itu harus dilaksanakan secara tertib, dalam arti tidak bisa terbalik penempatannya. Tingkat pendidikan seseorang akan berpengaruh

---

<sup>15</sup> Muhammad In'am Esha, 2006, *2 Tahun Universitas Islam Negeri Malang; Reorientasi Budaya Akademik Perguruan Tinggi*, Malang: UIN Press

dalam memberikan respon terhadap sesuatu yang datang dari luar, mereka yang mempunyai pendidikan lebih tinggi akan member respon yang rasional daripada mereka yang berpendidikan rendah.

#### 4. Tinjauan Umum tentang Peran Hukum dalam Masyarakat

Hukum merupakan suatu kebutuhan yang melekat pada kehidupan social dalam suatu masyarakat, yaitu bahwa hukum akan melayani anggota-anggota masyarakat, baik berupa pengalokasian kekuasaan, pendistribusian sumber-sumber daya, serta melindungi kepentingan anggota masyarakat itu sendiri oleh karenanya hukum menjadi semakin penting perannya sebagai sarana untuk mewujudkan kebijaksanaan-kebijaksanaan pemerintah. Kesadaran yang menyebabkan bahwa hukum merupakan instrumen penting untuk mewujudkan tujuan-tujuan tertentu, menjadikan hukum sebagai sarana yang secara sadar dan aktif digunakan untuk mengatur masyarakat, melalui penggunaan peraturan hukum yang dibuat dengan sengaja.<sup>16</sup> Pemberlakuan hukum adalah sebagai sarana untuk mencapai tujuan sebagaimana yang diharapkan, secara teknis hukum dapat memberikan hal-hal sebagai berikut :

1. Hukum merupakan suatu sarana untuk menjamin kepastian dan memberikan predikibilitas didalam kehidupan masyarakat;
2. Hukum sering dipakai oleh pemerintah sebagai sarana untuk melindungi melawan kritik;
3. Hukum dapat digunakan sebagai sarana untuk mendistribusikan sumber-sumber daya;
4. Hukum merupakan sarana pemerintah untuk menetapkan sanksi.<sup>17</sup>

Setiap sistem hukum menunjukkan empat unsure dasar yaitu pranata peraturan, proses penyelenggaraan hukum, prosedur pemberian keputusan oleh pengadilan dan lembaga penegakkan hukum. Peranan hukum didalam masyarakat khususnya dalam menghadapi perubahan masyarakat perlu dikaji dalam rangka mendorong terjadinya perubahan sosial. Pengaruh peranan hukum ini bisa bersifat langsung dan tidak langsung. Peranan hukum lebih terperinci dalam kehidupan masyarakat sebagai berikut :

- 1) Hukum berperan menciptakan keamanan dan ketertiban.
- 2) Hukum berperan menegakkan nilai-nilai berperan kebenaran dan keadilan.
- 3) Hukum berperan mengatur tingkah laku masyarakat.
- 4) Hukum berperan mendorong terwujudnya kerekatan sosial.
- 5) Hukum berperan membantu masyarakat untuk meraih kesejahteraan.

<sup>16</sup> Satjipto Rahardjo, 1996, *Hukum dalam Perspektif Sejarah dan Perubahan Sosial dalam Pembangunan Hukum dalam Perspektif Politik Hukum Nasional*, Rajawali Press, Jakarta, Hlm.19

<sup>17</sup> *Ibid.*, Hlm.14

## F. Metode Penulisan

### 1. Metode Pendekatan

Pendekatan masalah merupakan proses pemecahan atau penyelesaian masalah melalui tahap-tahap yang telah ditentukan sehingga mencapai tujuan penelitian atau penulisan.<sup>18</sup> Penulisan ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan cara menelaah dan menginterpretasikan hal-hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas, konsepsi, doktrin dan norma hukum yang berkaitan dengan “Kebutuhan Hukum dalam Pelaksanaan Pendidikan Karakter di Perguruan Tinggi”. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari jurnal-jurnal, buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini.<sup>19</sup>

### 2. Jenis Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam Tugas Akhir ini meliputi :

#### a. Bahan Hukum Primer<sup>20</sup>

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 3 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Pasal 4 Ayat (1) Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Undang-Undang Nomor 12 Pasal 1 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 50 Pasal 28 Ayat (1) Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Pendidikan Nasional Pendidikan Tinggi.

#### b. Bahan Hukum Sekunder

Data yang diperoleh dari study pustaka berupa jurnal-jurnal, buku-buku, makalah, rancangan peraturan perundang-undangan atau sumber-sumber lainnya yang berhubungan dengan penulisan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.

#### c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan bahan-bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus besar bahasa Indonesia, kamus hukum, ensiklopedia dan lainnya mengenai “Kebutuhan Hukum dalam Pelaksanaan Pendidikan Karakter di Perguruan Tinggi”.

### 3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang dilakukan dipenelitian ini adalah study kepustakaan (*library reesearch*). Study kepustakaan merupakan pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara

<sup>18</sup> Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, Hlm.112

<sup>19</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1985, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Pers, Hlm.52

<sup>20</sup> Peter Mahmdu Marzuki, 2009, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana Prenada Mulia, Hal.41.

luas serta dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif kemudian dikaji dan disusun secara komprehensif sistematis.<sup>21</sup>

#### 4. Teknik Analisis Bahan Hukum

Analisis data didalam penelitian ini, dilakukan secara kualitatif yakni pemilihan teori-teori, asas-asas, norma-norma, doktrin dan pasal-pasal didalam undang-undang. Data yang dianalisis secara kualitatif akan dikemukakan dalam bentuk uraian secara sistematis dengan menjelaskan hubungan antar jenis data, selanjutnya semua data diseleksi dan diolah kemudian dinyatakan secara deskriptif sehingga selain menggambarkan dan mengungkapkan dasar hukumnya atau teorinya dan dapat memberikan solusi terhadap permasalahan yang dimaksud.

### G. Hasil Penelitian dan Pembahasan

#### 1. Deskripsi tentang Pengaturan mengenai Pendidikan Karakter dalam Undang-Undang yang sedang berlakuserta Kekurangan dan Kelebihan Pengaturan Pendidikan Karakter di Perguruan Tinggi

Penguatan pendidikan moral atau pendidikan karakter dalam konteks sekarang sangat relevan untuk mengatasi krisis moral yang sedang melanda dinegara kita. Krisis tersebut antara lain berupa meningkatnya pergaulan bebas, maraknya angka keekerasan anak-anak dan remaja, kejahatan terhadap teman, pencurian remaja, kebiasaan menyontek, penyalahgunaan obat-obatan, pornografi, dan perusakan milik orang lain sudah menjadi masalah sosial yang hingga saat ini belum dapat diatasi secara utuntas, oleh karena ini betapa pentingnya pendidikan karakter. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Pendidikan yang baik tidak lepas dari seorang pendidik. Oleh karenanya diperlukan profesionalisme dalam mengajar.

Guru dan Dosen menyatakan bahwa guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan peserta didik jalur pendidikan formal, pendidikan dasar dan pendidikan menengah.<sup>22</sup> Karakter berarti tabiat, watak sifat-sifat kejiwaan, akhlak atau budi pekerti yang membedakan seseorang dengan orang lain.<sup>23</sup> Sistem pendidikan nasional mengembangkan sistem dan merancang watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan tujuan pendidikan nasional untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang

<sup>21</sup> Jhony Ibrahim, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia, Hlm.392

<sup>22</sup> Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, (Bandung: Citra Umbara, 2011), hlm. 2-3.

<sup>23</sup> Amirulah Syarbini. *Buku Pintar Pendidikan Karakter; Panduan Lengkap Mendidik Karakter Anak di Sekolah. Madrasah dan Rumah*. (Jakarta: As@-Prima Pustaka, 2012), hlm.1

bertanggung jawab.<sup>24</sup>Implikasi dari undang-undang tersebut, pendidikan di perguruan tinggi harus dikelola secara terprogram dan terintegrasi untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Bila kita melihat undang-undang Bab II Pasal 3 Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mana pendidikan memerlukan mengembangkan peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa dengan Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang disetujui serta bertanggungjawab. Pada pasal 1 undang-undang tentang sistem pendidikan nasional tahun 2003 menyatakan diantara tujuan pendidikan nasional adalah mengembangkan potensi peserta didik untuk memiliki kecerdasan, kepribadian dan akhlak mulia. Dari undang-undang tersebut, menemukan garis besar dari tujuan pendidikan nasional selain mencerdaskan peserta didik, juga terciptanya karakter peserta didik yang beriman, mandiri dan berakhlak mulia. Sikap dan karakter merupakan hal yang tidak kalah penting dari kecerdasan bagi peserta didik, lebih penting orang menganggapnya lebih penting. Buktinya adalah sebagian besar orang yang gagal di perguruan tinggi akan tetapi dimasa tuanya mereka jadi berhasil karena pendidikan karakter yang dialaminya.

Pendidikan karakter sebagai upaya penanaman kecerdasan dalam berfikir, penghayatan dalam bentuk sikap dan pengalaman dalam bentuk perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai luhur yang menjadi jati dirinya, diwujudkan dalam interaksi dengan tuhan, diri sendiri, masyarakat dan lingkungannya.<sup>25</sup> Cara membangun karakter seseorang itu bisa melalui dua kategori, pertama secara formal yaitu dengan memasukkan bahan mata kuliah yang dapat menunjang karakter anak seperti mata kuliah budi pekerti atau akhlak sebagai pedoman bagi peserta didik. Dihukum memberi hukuman kepada peserta didik yang terbukti membantah dan menghargai bagi yang berprestasi. Kedua hal ini tidak dapat dibatalkan, maka tidak akan efektif bila hanya menggunakan salah satunya. Dengan catatan hukuman ini adalah hukuman yang tidak memberi pertanggungjawaban psikologis untuk peserta didik seperti dengan menggunakan pertanggungjawaban yang keterlaluan. Kedua secara informal yaitu pendidikan karakter yang dilaksanakan melalui kebiasaan-kebiasaan yang positif bagi peserta didik seperti dijadwalkan kerohanian, upacara kebangsaan dan sebagainya. Strategi yang kedua sangat perlu mengingat aktivitas peserta didik tidak selalu bisa dilingkungan perguruan tinggi. Oleh karena itu, perlunya pendidikan dengan kebiasaan seperti diatas. Penilaian ketepatan jenis peraturan ditinjau dari berbagai sudut pandang yaitu dimulai dari namanya, politik hukumnya, dasar hukumnya maupun dari materi muatannya. Penanaman suatu peraturan perundang-undangan seharusnya mencerminkan materi muatannya. Hal ini juga dijelaskan dalam Lampiran II undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, petunjuk no.3 disebutkan dalam petunjuk tersebut bahwa nama peraturan perundang-undangan (PUU) disebut secara singkat dengan hanya menggunakan satu kata atau frasa tetapi secara esensial maknanya telah dan mencerminkan isi peraturan perundang-

<sup>24</sup> Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 3 tentang Sistem Pendidikan Nasional

<sup>25</sup> Zubaedi. *Desain Pendidikan Karakter: Konsepsi dan Aplikasinya dalam Lembaga Pendidikan*. (Jakarta: Kencana, 2011). Hlm.17



undangan. Peraturan menteri dapat pula mengatur lebih lanjut atas dasar kewenangan pendelegasian dari undang-undang, namun hanya sebatas peraturan yang bersifat teknis administrative.<sup>26</sup> Pada bagian dasar hukum dalam suatu peraturan perundang-undangan (dasar hukum formil) dan peraturan perundang-undangan lebih lanjut (dasar hukum materiil). Peraturan perundang-undangan yang dinilai tidak tepat jenis peraturan perundang-undangannya adalah undang-undang nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen, undang-undang nomor 9 tahun 2009 tentang badan hukum pendidikan (sudah dicabut dengan putusan MK nomor 11-14-21-126-136/PUU-VII/2009) serta undang-undang nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi. Berikut table analisis dan evaluasi terhadap peraturan perundang-undangan mengenai sistem pendidikan nasional ditinjau dari materi muatannya.

**Tabel 4**  
**Kesesuaian Antara Jenis, Hierarki dan Materi Muatan<sup>27</sup>**

No	Indikator	Kesesuaian		Analisis	Rekomendasi		
		Ya	Tidak		Tetap	Ubah	Cabut
1.	Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional						
	Mengatur lebih lanjut ketentuan UUD RI Tahun 1945, yang meliputi :	✓		<p><b>A. Analisis terhadap “nama” UU :</b> Dalam petunjuk nomor 3 Lampiran II undang-undang nomor 12/2011, dinyatakan bahwa nama PUU menggunakan kata atau frasa, yang secara esensial maknanya telah mencerminkan isi drai PUU itu sendiri.</p> <p><b>B. Analisis terhadap dasar hukum mengingat : Pasal 20,Pasal 21,Pasal 28 C Ayat (1), Pasal 31, Pasal 32.</b></p> <p><b>C. Analisis terhadap Politik Hukum (arah pengaturan):</b> a. pembukaan UUD RI Tahun 1945 mengamankan pemerintah negara indonesia yang melindungi segenap bangsa indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia; b. bahwa UUD RI Tahun 1945 sistem pendidikan nasional; c. bahwa sistem pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan; d. bahwa UU No.2 Tahun 1989 tentang Sistem</p>	✓		

<sup>26</sup>Undang-undang Nomor 12 Lampiran II Petunjuk Nomor 211 tahun 2011.

<sup>27</sup> Sumber Data diolah

				Pendidikan Nasional tidak memadai lagi.			
	Pelaksanaan dan penegakan kedaulatan negara serta pembagian kekuasaan negara	✓		- Kedaulatan memiliki arti kekuasaan untuk mengatur. - Pelaksanaan kedaulatan negara tercermin dalam Pasal 10.			
	Kewarganegaraan dan kependudukan	✓		- Setiap warga negara baik WNI maupun WNA mendapatkan jaminan menjadi peserta didik pada satuan pendidikan di Indonesia, sesuai pasal 11 dan pasal 12.			
2.	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pendidikan Tinggi (Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang)						
	Mengatur lebih lanjut ketentuan UUD RI Tahun 1945 yang meliputi :			A. Analisis terhadap “nama” UU : dalam petunjuk no.3 lampiran II UU 12/2011, dinyatakan bahwa nama PUU dibuat secara singkat dengan hanya menggunakan satu kata atau frasa yang secara esensial maknanya telah dan mencerminkan isi dari PUU itu sendiri. Ditinjau dari namanya “Pendidikan Tinggi” dapat diasumsikan bahwa UU ini berisi tentang peranan pendidikan tinggi sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional. Maka berdasarkan analisis terhadap nama, maka PUU ini sudah tepat menjadi UU.		✓	
	1. HAM	✓					
	2. Hak dan kewajiban warga negara	✓					
	3. Pelaksanaan dan penegakan kedaulatan negara serta pembagian kekuasaan		✓				
	4. Wilayah negara dan pembagian daerah	✓					
	5. Kewarganegaraan dan kependudukan		✓				
	6. Keuangan negara	✓					
	Perintah undang-undang untuk diatur dengan undang-undang		✓	B. Analisis terhadap dasar hukum mengingat : Pada bagian dasar hukum mengingat disebutkan 3 Pasal UUD RI Tahun 1945 yaitu Pasal 20, Pasal 21 dan Pasal 31.			
	Pengaturan mengenai kewenangan absolute pemerintah pusat dan tindak lanjut Putusan MK		✓	C. Analisis terhadap politik hukum (arah pengaturan) : pada konsideran menimbang disebutkan : a. bahwa UUD RI Tahun 1945 mengamatkan kepada pemerintah untuk mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan; b. bahwa			

				pendidikan tinggi sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional; c. bahwa untuk meningkatkan daya saing bangsa dalam menghadapi globalisasi di segala bidang; d. bahwa untuk mewujudkan keterjangkauan dan pemerataan; e. bahwa untuk menjamin penyelenggaraan pendidikan tinggi diperlukan pengaturan sebagai dasar dan kepastian hukum.			
3.	Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen						
	1. Melaksanakan ketentuan undang-undang (diperintahkan secara tegas)	✓		Pada konsideran untuk melaksanakan ketentuan Pasal 47 Ayat (3), Pasal 51 ayat (2), Pasal 53 Ayat (4), Pasal 55 Ayat (4), Pasal 56 Ayat (2), Pasal 57 Ayat (3), Pasal 61 Ayat (2), Pasal 62 Ayat (2), Pasal 63 Ayat (2), Pasal 64 Ayat (2), Pasal 74 Ayat (5) dan Pasal 76 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.	✓		
	2. Melaksanakan ketentuan undang-undang sepanjang diperlukan (tidak diperintahkan secara tegas)		✓				
	3. Tindak lanjut putusan MA		✓				
4.	Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.						
	1. Melaksanakan ketentuan undang-undang (diperintahkan secara tegas)	✓		Pada konsideran menimbang dinyatakan bahwa dalam ketentuan Pasal 7 Ayat (5), Pasal 24 Ayat (6), Pasal 25 Ayat (6), Pasal 26 Ayat (8), Pasal 43 Ayat (4), Pasal 60 Ayat (7), Pasal 68 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.	✓		
	2. Melaksanakan ketentuan undang-undang sepanjang diperlukan (tidak diperintahkan secara tegas)		✓				

	3. Tindak lanjut putusan MA		✓				
5.	Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 50 Pasal 28 Ayat (1) Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Pendidikan Nasional Pendidikan Tinggi.						
	1. Melaksanakan ketentuan undang-undang (diperintahkan secara tegas)	✓		Pada konsideran menimbang dinyatakan bahwa dalam ketentuan Pasal 28 Ayat (4) dan Pasal 28 Ayat (5) tentang Standar Pendidikan Nasional Pendidikan Tinggi.	✓		
	2. Melaksanakan ketentuan undang-undang sepanjang diperlukan (tidak diperintahkan secara tegas)		✓				
	3. Tindak lanjut putusan MA		✓				
6.	Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter						
	1. Melaksanakan lebih lanjut perintah undang-undang	✓		Perpres ini bertumpu pada pasal 3 UU No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.	✓		
	2. Melaksanakan lebih lanjut perintah Peraturan Pemerintah		✓	Perpres ini tidak melaksanakan lebih lanjut perintah Peraturan Pemerintah, karena telah diperintahkan oleh UU.			
	3. Untuk melaksanakan penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan	✓		Pada dasar hukum mengingat Perpres ini terdapat Pasal 4 Ayat (1) UU 1945.			
	4. Tindak lanjut putusan MA		✓	Belum ada JR ( <i>Judicial Review</i> ) oleh MA terhadap Perpres ini.			

Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1 pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.<sup>28</sup>Pendidikan nasional bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab.<sup>29</sup>Dalam melaksanakan tanggungjawab dibidang pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a,Menteri memiliki tugas dan wewenangmen gatur mengenai Sistem Pendidikan

<sup>28</sup> Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1 Ayat (1) tentang Sistem Pendidikan Nasional

<sup>29</sup>Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 3 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Tinggi, Anggaran Pendidikan Tinggi, Hak Mahasiswa, Akses yang Berkeadilan, Mutu Pendidikan Tinggi, Relevansi Hasil Pendidikan Tinggi, Ketersediaan Perguruan Tinggi.<sup>30</sup> Sebagaimana isi peraturan mengenai pendidikan karakter tujuan pendidikan karakter pada dasarnya adalah untuk mendorong lahirnya manusia yang baik, yang memiliki kepribadian yang menarik, beretika, bersahaja, jujur, cerdas, peduli dan tangguh. Tumbuh dan berkembangnya karakter yang baik akan mendorong peserta didik untuk tumbuh dengan kapasitas dan komitmen untuk melakukan berbagai hal yang terbaik dan melakukan segalanya dengan benar dan memiliki tujuan hidup. Perguruan tinggi memiliki tujuan membentuk insane yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berkepribadian luhur, sehat, berilmu dan cakap, kritis, kreatif, inovatif, mandiri, percaya diri dan berjiwa wirausaha, serta toleran, peka sosial dan lingkungan, demokratis dan bertanggung jawab.<sup>31</sup>

Perguruan tinggi merupakan tempat pencarian ilmu pengetahuan, pemecahan berbagai masalah, tempat mengkritik karya-karya yang dihasilkan dan sebagai pusat pelatihan manusia.<sup>32</sup> Masyarakat Indonesia masih menaruh harapan pada perguruan tinggi sebagai tempat latihan dan pendidikan bagi calon penerus bangsa menjadi kaum intelektual yang memiliki ilmu tinggi dan perilaku terpuji. Dalam konteks perguruan tinggi, modal budaya dipengaruhi oleh konteks lingkungan dimana peserta didik hidup, sehingga membentuk pengalaman, sekaligus karakternya. Adapun beberapa kondisi diluar kurikulum yang perlu diperhatikan perguruan tinggi karena hal-hal tersebut mendukung suksesnya implementasi pendidikan karakter, yakni :<sup>33</sup>

- 1) Budaya kampus dan praktik-praktik interpersonal yang menjamin bahwa peserta didik diperlakukan dengan perhatian dan hormat;
- 2) Dosen, staff menjadi model karakter yang baik bagi peserta didik, menghidupkan nilai-nilai dalam interaksi keseharian dengan peserta didik;
- 3) Memberikan kesempatan pada peserta didik memiliki otonomi dan pengaruh dalam pengelolaan perguruan tinggi seperti memberikan wadah untuk menampung aspirasi peserta didik.

Dengan demikian, dosen maupun staff administratif akan menemui tantangan tersendiri karena mereka akan menjadi pribadi yang juga berupaya menjadi model yang baik bagi peserta didik. Mendorong dan menginspirasi agar peserta didik mengembangkan moral yang baik dan akan membuat mereka menjadi orang dewasa yang matang dan bertanggung jawab. Kejujuran perguruan tinggi akan ketidakmampuannya untuk berdiri sendiri menyelenggarakan pendidikan karakter.<sup>34</sup>

<sup>30</sup>Peraturan Pemerintah Nomor 4 Pasal 4 Ayat (1) Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi

<sup>31</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Pasal 84 Ayat (2) tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.

<sup>32</sup>Syukri.2009. *Peran Pendidikan di Perguruan Tinggi Terhadap Perubahan Perilaku Kaum Intelektual (Sosial Individu)*. Jurnal Ilmiah Kreatif, 4 (1), 1-15.

<sup>33</sup>Berkowitz. 2002. *The science of character education*. Hoover Institution Press.

<sup>34</sup>*Ibid.*,

**Tabel 5**  
**Penilaian Terhadap Materi Muatan Peraturan Perundang-Undangan<sup>35</sup>**  
 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

No	Pasal	Keterkaitan Dengan		Analisis	Rekomendasi		
		Asas	Indikator		Tetap	Ubah	Cabut
1.	Pasal 6 Ayat (1)	Keadilan	Peluang yang sama bagi setiap warga negara terhadap akses pemanfaatan sumber daya.	Pasal 6 Ayat (1) menyatakan bahwa Setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun wajib mengikuti pendidikan dasar.		✓	
2.	Pasal 7 Ayat (2)	Pengayoman	Keberlanjutan generasi ini dan generasi yang akan datang.	Pasal 7 Ayat (2) menyatakan bahwa orangtua dari anak usia wajib belajar, berkewajiban memberikan pendidikan dasar kepada anaknya.		✓	
3.	Pasal 9	Pengayoman	Keberlanjutan generasi ini dan generasi yang akan datang.	Pasal 9 menyatakan bahwa berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan.		✓	
4.	Pasal 12 Ayat (2)	Pengayoman	Jaminan terhadap keberlanjutan generasi ini dan generasi yang akan datang.	Pasal 12 Ayat (2) berbunyi : Setiap peserta didik berkewajiban : a. Menjaga norma-norma pendidikan untuk menjamin keberlangsungan proses dan keberhasilan pendidikan; b. Ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan, kecuali bagi peserta didik yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.		✓	
5.	Pasal 53	Ketertiban dan kepastian hukum.	Kejelasan aturan dalam penyelesaian konflik.	pasal 53 ini mengatur tentang badan hukum pendidikan. Pasal ini mencerminkan privatisasi/otonomi pendidikan di Indonesia yang mengindikasikan semakin melemahnya peran negara dalam melaksanakan sektor pelayanan publik.			✓

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen

No	Pasal	Keterkaitan Dengan		Analisis	Rekomendasi		
		Asas	Indikator		Tetap	Ubah	Cabut
1.	Pasal 8	Ketertiban dan Kepastian Hukum	Kejelasan aturan mengenai koordinasi	Pasal 8 menyatakan bahwa guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.		✓	

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi

<sup>35</sup> Sumber Data diolah



No	Pasal	Keterkaitan Dengan		Analisis	Rekomendasi		
		Asas	Indikator		Tetap	Ubah	Cabut
1.	Pasal 50,62, 65,73, 74,76 84,86, 88,90.	Kebangsaan.	Pembatasan keikutsertaan pihak asing.	Pasal-pasal ini mencerminkan substansi titipan produk liberal pemerintah Indonesia yang menjadi anggota WTO Tahun 1994 tunduk pada aturan GATS, perjanjian tersebut terdapat 12 sektor jasa Internasional, termasuk pendidikan.		✓	

#### 4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen

No	Pasal	Keterkaitan Dengan		Analisis	Rekomendasi		
		Asas	Indikator		Tetap	Ubah	Cabut
1.	Pasal 1 Ayat (14)	Ketertiban dan kepastian hukum.	Kejelasan aturan mengenai koordinasi.	Pasal 1 Ayat (14) : Departemen yang menangani urusan pemerintahan dalam bidang pendidikan nasional.		✓	
2.	Pasal 1 Ayat (15)	Ketertiban dan kepastian hukum.	Kejelasan aturan mengenai koordinasi	Pasal 1 Ayat (15) : Menteri adalah menteri yang menangani urusan pemerintahan dalam bidang pendidikan nasional.		✓	

#### 5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi

No	Pasal	Keterkaitan Dengan		Analisis	Rekomendasi		
		Asas	Indikator		Tetap	Ubah	Cabut
1.	Pasal 1 Ayat (20)	Ketertiban dan kepastian hukum	Kejelasan aturan mengenai koordinasi	Pasal 1 Ayat (20) : Kementrian adalah perrangkat pemerintaan yaang membiidangi urrusan pemerintahan diibidang pendiidikan.		✓	
2.	Pasal 1 Ayat (23)	Ketertiban dan kepastian hukum	Kejelasan aturan mengenai koordinasi	Pasal 1 Ayat (23) : Mentteri adalah mentteri yaang menyellenggarakan urrusan pemerintahan diibidang pendiidikan.		✓	

#### 6. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

No	Pasal	Keterkaitan Dengan		Analisis	Rekomendasi		
		Asas	Indikator		Tetap	Ubah	Cabut
1.	Pasal 3	Ketertiban dan kepastian hukum	Kejelasan aturan mengenai koordinasi	Pasal 3 : Kementrian adalah perrangkat pemerintaan yaang membiidangi urrusan pemerintahan diibidang pendiidikan.		✓	
2.	Pasal 11 Ayat (1)	Ketertiban dan kepastian hukum	Kejelasan aturan mengenai koordinasi	Pasal 1 Ayat (23) : Mentteri adalah mentteri yaang menyellenggarakan urrusan pemerintahan diibidang pendiidikan.		✓	

7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

No	Pasal	Keterkaitan Dengan		Analisis	Rekomendasi		
		Asas	Indikator		Tetap	Ubah	Cabut
1.	Pasal 28 Ayat (4)	Ketertiban dan kepastian hukum	Kejelasan aturan mengenai koordinasi	Pasal 3 : Kementterian adalah perrangkat pemerintaan yaang membiidangi urrusan pemerintahan diibidang pendiidikan.	✓		
2.	Pasal 28 Ayat (5)	Ketertiban dan kepastian hukum	Kejelasan aturan mengenai koordinasi	Pasal 1 Ayat (23) : Mentteri adalah mentteri yaang menyellenggarakan urrusan pemerintahan diibidang pendiidikan.	✓		

8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter

No	Pasal	Keterkaitan Dengan		Analisis	Rekomendasi		
		Asas	Indikator		Tetap	Ubah	Cabut
1.	Pasal 11	Ketertiban dan kepastian hukum	Kejelasan aturan mengenai koordinasi	Pasal 11: Penyelenggaraan PPK pada satuan Pendidikan jalur Pendidikan informal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Huruf a Angka 3 dilakukan melalui penguatan nilai-nilai karakter dalam pendidikan di keluarga dan lingkungan dalam bentuk kegiatan belajar secara mandiri.		✓	

Pada kenyataannya aturan tersebut tidak dilaksanakan dengan baik, masih banyak perguruan tinggi tidak menerapkan mengenai pendidikan karakter padahal pendidikan karakter sangat penting untuk membentuk sikap dan sifat peserta didik menjadi seseorang yang lebih disiplin, sopan, santun, tanggungjawab, taat pada aturan, dan sebagainya. Kebanyakan perguruan tinggi tidak terlalu menerapkan pendidikan karakter ini dikarenakan tidak adanya sanksi yang tegas apabila setiap perguruan tinggi yang tidak memberikan Ilmu pengetahuan atau matakuliah mengenai pendidikan karakter akan dikenakan sanksi. Salah satu sanksi yang harus diterapkan atau ditegakkan dalam hal ini adalah berkurangnya nilai akreditasi kampus atau jurusan. Pendidikan karakter ini seharusnya diterapkan pada setiap jurusan agar peserta didik sama rata memperoleh Ilmu pengetahuan mengenai pendidikan karakter tersebut. Dilihat dari fenomena yang ada pendidikan karakter hanya diberikan atau diterapkan oleh salah satu jurusan atau fakultas tidak semua fakultas atau jurusan yang menerapkan sistem perkuliahan mengenai pendidikan karakter dan adapun juga jurusan atau fakultas yang menerapkan sistem perkuliahan mengenai pendidikan karakter tidak dimasukkan kedalam matakuliah wajib akan tetapi menjadi matakuliah pilihan.

Pada ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi “*Sivitas Akademika merupakan komunitas yang memiliki tradisi ilmiah dengan mengembangkan budaya akademik*”. Pasal 11 ayat (2) “*Budaya akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan seluruh sistem nilai, gagasan, norma, tindakan dan karya yang bersumber dari ilmu pengetahuan dan teknologi*”.

*sesuai dengan asas pendidikan tinggi*”. Sebagaimana isi pasal tersebut perguruan tinggi mampu memberikan pendidikan yang terbaik dan menciptakan peserta didik yang secara aktif mengembangkan potensi dirinya. Penerapan pendidikan karakter diperguruan tinggi didasarkan pada lima pilar utama, diantaranya :<sup>36</sup>

1. Tri Dharma Perguruan Tinggi, pendidikan karakter bisa diintegrasikan kedalam kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berkarakter.
2. Budaya Perguruan Tinggi (kampus) / Budaya Organisasi, mahasiswa dituntut untuk dapat membiasakan diri dalam kehidupan keseharian dilingkungan perguruan tinggi.
3. Kegiatan Kemahasiswaan, pendidikan karakter dapat diciptakan melalui iintegrasi kedalam kegiatan kemahasiswaan, antara lain pramuka, olahraga, karya tulis, seni workshop dan acara yang melibatkan mahasiswa dalam sistem kepanitiannya.
4. Kegiatan Keseharian, pendidikan karakter dapat dimunculkan dengan penerapan pembiasaan kehidupan keseharian dilingkungan keluarga, asrama dan masyarakat.
5. Budaya Akademik, nilai pendidikan karakter secara perspektif terbentuk dengan adanya totalitas budaya akademik.

Dengan pertimbangan dalam rangka mewujudkan bangsa yang berbudaya melalui penguatan nilai-nilai religius, jujur, toleran, disiplin, kreatif, bekerja keras, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial dan bertanggungjawab, pemerintah memandang perlu penguatan pendidikan karakter. Atas dasar pertimbangan tersebut adanya peraturan presiden nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter. Dalam perpres disebutkan bahwa penguatan pendidikan karakter yang selanjutnya disingkat dengan PPK adalah gerakan pendidikan dibawah tanggung jawab satuan pendidikan untuk memperkuat karakter peserta didik melalui harmonisasi olah hati, olah rasa, olah pikir dan olah raga dengan melibatkan dan kerjasama antara satuan pendidikan, keluarga dan masyarakat sebagai bagian dari Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM).<sup>37</sup> PPK dilaksanakan dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam pendidikan karakter terutama meliputi nilai-nilai, religius, jujur, toleran, disiplin, bekerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial dan bertanggungjawab.<sup>38</sup> Dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Pasal 4 Tahun 2018 tentang Penguatan Pendidikan Karakter Pendidikan Formal dinyatakan bahwa penyelenggaraan PPK pada perguruan tinggi bertujuan untuk menanamkan nilai karakter dalam pelaksanaan pembelajaran. Walaupun demikian, perguruan tinggi di Indonesia harus mengambil tempat dalam menerapkan pendidikan karakter pada diri peserta didik.

<sup>36</sup> Soetanto, 2012, *Pendidikan Karakter*, Malang: Universitas Brawijaya.

<sup>37</sup> Peraturan Presiden Nomor 87 Pasal 1 Ayat (1) Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter

<sup>38</sup> Peraturan Presiden Nomor 87 Pasal 3 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter

Penerapan pendidikan karakter diperguruan tinggi didasarkan pada lima pilar utama, yakni :<sup>39</sup>

1. Tri Darma Perguruan Tinggi

Pendidikan karakter bisa diintegrasikan kedalam kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berkarakter.

2. Budaya Perguruan Tinggi (Kampus) / Budaya Organisasi

Peserta didik dituntut untuk dapat membiasakan diri dalam kehidupan keseharian dilingkungan perguruan tinggi.

3. Kegiatan Kemahasiswaan

Pendidikan karakter dapat diciptakan melalui integrasi ke dalam kegiatan kemahasiswaan, antara lain pramuka, olahraga, karya tulis, seni, workshop, dan acara yang melibatkan peserta didik dalam sistem kepanitiannya.

4. Kegiatan Keseharian

Pendidikan karakter dapat dimunculkan dengan penerapan pembiasaan kehidupan keseharian dilingkungan keluarga, asrama / kost, dan masyarakat.

5. Budaya Akademik

Nilai pendidikan karakter secara perspektif terbentuk dengan adanya totalitas budaya akademik.

Penilaian berdasarkan potensi disharmoni terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait dengan masalah sistem pendidikan nasional, ditinjau terhadap antara ketentuan pasal satu perundang-undangan atau antara ketentuan pasal dari suatu peraturan perundang-undangan dengan perundang-undangan lainnya, baik yang setingkat maupun yang bertingkat secara vertikal. Berikut table temuan masalah yang menggambarkan disharmoni antar ketentuan

**Tabel 6**  
**Analisis dan Evaluasi Hukum Berdasarkan Potensi Disharmoni Peraturan Perundang-Undang<sup>40</sup>**

No	Ketentuan Pasal/PUU	Variabel	Temuan Potensi Disharmoni	Analisis	Rekomendasi	
					Ubah	Cabut
1	Pasal 6, Pasal 9, Pasal 12, Pasal 24, Pasal 46 dan Pasal 47 Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional/Sisdiknas yang menyatakan kewajiban warga negara dan masyarakat terhadap pendidikannya	Kewajiban	Pembukaan Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945, Pasal 31 UUD RI Tahun 1945 yang menyatakan tanggungjawab negara terhadap pendidikan warga negaranya	Kelemahan Pasal 6, Pasal 9, Pasal 12, Pasal 24, Pasal 46 dan Pasal 47 Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional ini terletak pada ketidakberpihakannya akses pendidikan bagi rakyat secara keseluruhan.	✓	

<sup>39</sup> Soetanto, Hendrawan. 2012. *Pendidikan Karakter*. Malang: Universitas Brawijaya.

<sup>40</sup> Sumber data diolah

2	Pasal 36, Pasal 37 Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional	Kewajiban	Pasal 1 Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional	Pasal 36 dan Pasal 37 Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional/Sisdiknas (tentang kurikulum yang tidak memasukkan Pancasila sebagai muatan wajib).	✓	
3	Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi	Kewenangan	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi	Pengaturan pendidikan tinggi juga mengalami dualisme dalam penjabaran peraturan pelaksanaannya.	✓	
4	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi	Kewenangan	Pasal 24 Ayat (4) Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional	Penyelenggaraan pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1), Ayat(2), Ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.	✓	
5	Pasal 63 Ayat (1) Huruf b,c PP Standar Nasional Pendidikan	Kewenangan	Pasal 78 Huruf e PP Standar Nasional Pendidikan	Pada PP Standar Nasional Pendidikan Pasal 78 Huruf e dijelaskan bahwa pemerintah hanya mengevaluasi kinerja pendidikan. Pasal 63 Ayat (1) Huruf b dan c yang menyatakan bahwa penilaian hasil belajar dilakukan satuan pendidikan dan pemerintah.	✓	
6	Pasal 58 Ayat (1) Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional	Kewenangan	Pasal 63 Ayat (1) PP Standar Nasional Pendidikan	Pasal 58 Ayat (1) UU Sisdiknas dijelaskan bahwa evaluasi hasil belajar peserta didik dilakukan oleh pendidik untuk memantau proses.	✓	

Tabel 7

### Kelebihan dan Kekurangan mengenai Pengaturan Pendidikan Karakter di Perguruan Tinggi<sup>41</sup>

Adapun penjelasan secara singkat atau yang dimaksud kesimpulan dipergunakan untuk mempermudah memahami mengenai kelebihan serta kekurangan dari pengaturan pendidikan karakter diantaranya adalah :

Kelebihan	Kekurangan
1. Peraturan mengenai pendidikan karakter di yang melalui olahhati, olahraga, olahpikir dan olahraga dengan melibatkan dan kerjasama antara satuan pendidikan, keluarga dan masyarakat.	Terbatasnya pelibatan publik merupakan salah satu kelemahan dalam menumbuhkan karakter peserta didik.
2. Perguruan tinggi diharuskan menerapkan pendidikan karakter disetiap mata kuliah yang akan diajarkan atau diberikan kepada peserta didik.	Terbatasnya pendampingan orangtua dalam membimbing dan membangun karakter peserta didik.

<sup>41</sup> Sumber Data diolah

3. Pihak yang ada di lingkungan perguruan tinggi harus terlibat tanpa terkecuali, orangtua, masyarakat dan peserta didik bekerjasama untuk menerapkan pendidikan karakter.	Factor keteladanan orangtua, dosen maupun lingkungan perguruan tinggi dan bahkan tokoh-tokoh masyarakat yang tidak menjadi role model bagi peserta didik.
4. Kebijakan ini merupakan bentuk pemerintah terhadap cita-cita dibentuknya Indonesia, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa dan sekaligus bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia.	Harmonisasi antara olah hati, olah pikir, olah rasa, dan olahraga masih belum optimal, karena perguruan tinggi masih memprioritaskan kompetisi pengetahuan akademis, tanpa diperkuat dengan pendidikan karakter.
5. Peraturan ini bertujuan untuk membekali peserta didik sebagai generasi emas Indonesia dengan jiwa Pancasila dan pendidikan karakter yang baik.	Masih terbatasnya prasarana dan sarana fisik dan pembelajaran di perguruan tinggi yang kondisi kesenjangannya masih sangat beragam..

Kelebihan dari peraturan mengenai pendidikan karakter di perguruan tinggi tentang Penguatan Pendidikan Karakter menjelaskan bahwa penguatan pendidikan karakter untuk memperkuat karakter peserta didik melalui harmonisasi olah hati, olah rasa, olah pikir dan olah raga dengan melibatkan dan kerjasama antara satuan pendidikan, keluarga dan masyarakat sebagai bagian dari Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM). Bahwa perguruan tinggi harus menerapkan pendidikan karakter di setiap mata kuliah yang akan diajarkan atau diberikan kepada peserta didik, untuk menciptakan peserta didik yang berbudi luhur, aktif, tanggung jawab, toleran, taat pada agama, taat pada aturan, jujur, cerdas, tangguh dan peduli. Semua pihak yang terlibat, tidak hanya dosen sebagai pengampu matakuliah, namun juga semua civitas akademika, orangtua, masyarakat dan peserta didik yang bersangkutan harus bisa bekerjasama dalam rangka menerapkan pendidikan karakter. Semua perkuliahan yang berkaitan dengan norma atau nilai-nilai perlu dan harus dikembangkan, diekspresikan, dikaitkan dengan konteks kehidupan sehari-hari. Dalam pelaksanaan pendidikan karakter ini harus melibatkan semua civitas akademik atau semua yang ada di lingkungan perguruan tinggi, sehingga tidak menimbulkan kecemburuan sosial ataupun pilih kasih dan dampak dari pendidikan karakter ini semua warga yang ada di lingkungan perguruan tinggi akan menjadi pribadi yang memiliki karakter baik.

Kelemahan dari peraturan mengenai pendidikan karakter di perguruan tinggi itu sendiri tidak semua perguruan tinggi menerapkan sistem pendidikan karakter di setiap mata kuliah ataupun program kemahasiswaan. Sehingga ada perbedaan lulusan atau alumni antara perguruan tinggi satu dengan perguruan tinggi lainnya. Peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah itu tidak ada sanksinya atau hukuman bagi perguruan tinggi yang tidak menerapkan pendidikan karakter di lingkungan perguruan tinggi, sehingga tidak semuanya perguruan tinggi menerapkan pendidikan karakter kepada peserta didiknya. Apabila pendidikan karakter diterapkan oleh setiap perguruan tinggi dan dengan adanya aturan yang sangat ketat akan lebih baik lagi dan menciptakan peserta didik yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Pada kenyataannya aturan tersebut tidak dilaksanakan dengan baik, masih banyak perguruan tinggi tidak menerapkan mengenai pendidikan karakter padahal pendidikan karakter sangat penting untuk membentuk sikap dan sifat peserta didik menjadi seseorang yang lebih disiplin,

sopan, santun, tanggungjawab, taat pada aturan, dan sebagainya. Untuk itu, peran dan partisipasi aktif tripusat yaitu keluarga, perguruan tinggi dan masyarakat sangat dibutuhkan dalam upaya pembangunan karakter menghadapi berbagai dinamika kehidupan dan tantangan di era digital ini.

## 2. Pengaturan yang Ideal Pada Pendidikan Karakter di Perguruan Tinggi

Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1 pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.<sup>42</sup> Pendidikan nasional bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab.<sup>43</sup> Pada ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi *“Sivitas Akademika merupakan komunitas yang memiliki tradisi ilmiah dengan mengembangkan budaya akademik”*. Pasal 11 ayat (2) *“Budaya akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan seluruh sistem nilai, gagasan, norma, tindakan dan karya yang bersumber dari ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan asas pendidikan tinggi”*. Sebagaimana isi pasal tersebut perguruan tinggi mampu memberikan pendidikan yang terbaik dan menciptakan peserta didik yang secara aktif mengembangkan potensii diriinya unttuk memiliki kekuattan spiiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Peraturan Menteri Riset, Teknollogi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi Pasal 1 beberapa ketentuan dalam Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tiinggi diubah menjadi ketentuan Pasal 28 Ayat (4) dan Ayat (5) diubah, sehingga Pasal 28 berbunyi *“Penghitungan beban kerja dosen dapat didasarkan pada kegiatan pokok dosen mencakup antara lain perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian proses pembellajaran, pelaksanaan evaluasi hasil pembelajaran, pembimbingan dan pelatihan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat”*.<sup>44</sup> Kegiatan dalam bentuk pelaksanaan tugas tambahan dan kegiatan penunjang. Pada Pasal 28 Ayat (4) yaitu beban kerja dosen mengacu pada ekuivalen waktu mengajar penuh serta nisbah

<sup>42</sup> Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1 Ayat (1) tentang Sistem Pendidikan Nasional

<sup>43</sup> Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 3 tentang Sistem Pendidikan Nasional

<sup>44</sup> Peraturan Menteri Riiset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Sttandar Nasional Pendidikan Tinggi.

dosen dan mahasiswa.<sup>45</sup>Pada Pasal 28 Ayat (5) menyatakan ekuivalen waktu mengajar penuh serta nisbah dosen dan mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Menteri.<sup>46</sup>Dalam melaksanakan tanggungjawab dibidang pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, Menteri memiliki tugas dan wewenang mengatur mengenai<sup>47</sup>sistem pendidikan tinggi, anggaran pendidikan tinggi, hak mahasiswa, akses yang berkeadilan, Mutu pendidikan tinggi, relevansi hasil pendidikan tinggi dan ketersediaan perguruan tinggi.

Sebagaimana isi peraturan mengenai pendidikan karakter tujuan pendidikan karakter pada dasarnya adalah untuk mendorong lahirnya manusia yang baik, yang memiliki kepribadian yang menarik, beretika, bersahaja, jujur, cerdas, peduli dan tangguh. Individu yang berkarakter baik dan tangguh adalah seseorang yang berusaha melakukan hal-hal yang terbaik terhadap Tuhan Yang Maha Esa, dirinya, sesama, lingkungan, bangsa, negara serta dunia Internasional pada umumnya dengan mengoptimalkan potensi dirinya dan disertai dengan kesadaran, emosi dan motivasi. Dengan demikian, dosen maupun staf administratif akan menemui tantangan tersendiri karena mereka akan menjadi pribadi yang juga berupaya menjadi model yang baik bagi peserta didik. Pembangunan karakter dan pendidikan karakter menjadi suatu keharusan karena pendidikan tidak hanya menjadikan peserta didik menjadi cerdas, juga mempunyai budi pekerti dan sopan santun sehingga keberadaannya sebagai anggota masyarakat menjadi bermakna baik bagi dirinya maupun orang lain. Oleh karena itu, pendidikan karakter secara singkat dapat dipahami sebagai upaya menanamkan kebiasaan tentang hal-hal yang baik sehingga menjadi faham, mampu merasakan dan mau melakukan yang baik tersebut dalam segenap kehidupannya secara konsisten. Dari kelebihan dan kelemahan mengenai peraturan pendidikan karakter penulis mengaitkan teori dengan peran hukum dalam masyarakat. Aturan mengenai kurikulum mengenai pendidikan karakter yang akan diberikan atau diperoleh peserta didik. Aspek yang diatur adalah mengenai hukum dan kurikulum pendidikan karakter, itu sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi Pasal 1 beberapa ketentuan dalam Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

---

<sup>45</sup>*Ibid.*,

<sup>46</sup>*Op.Cit.*,

<sup>47</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 4 Pasal 4 Ayat (1) Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi



## H. Kesimpulan dan Saran

### 1. Kesimpulan

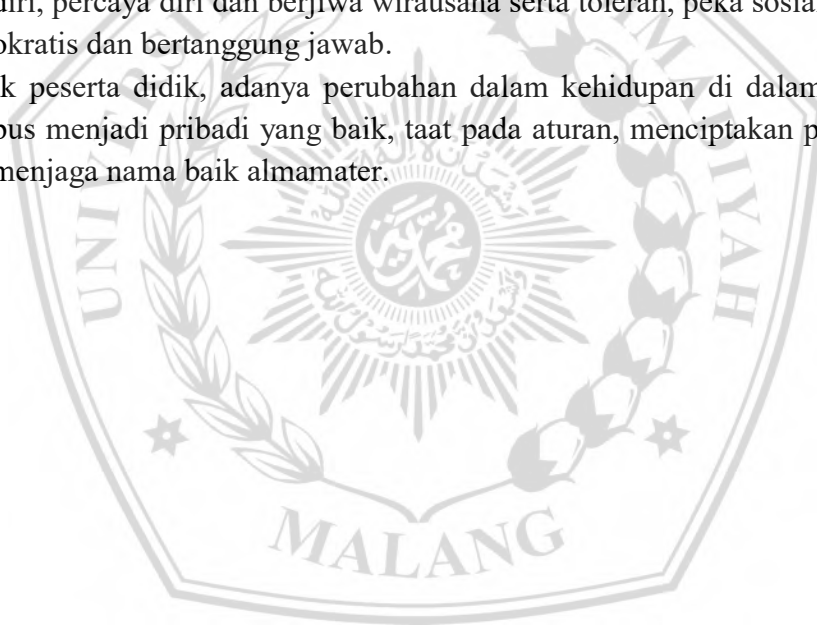
Berdasarkan hasil pembahasan diatas, maka penulis mengambil kesimpulan, sebagai berikut :

- a. Bahwa peraturan mengenai pendidikan karakter di perguruan tinggi dapat diketahui bahwa mengenai kelebihan dan kekurangan yaitu :
  - 1) Kelebihannya yaitu Peraturan mengenai pendidikan karakter di perguruan tinggi sudah jelas diatur tentang Penguatan Pendidikan Karakter yang menjelaskan bahwa penguatan pendidikan karakter yang selanjutnya disingkat dengan PPK adalah gerakan pendidikan dibawah tanggung jawab satuan pendidikan untuk memperkuat karakter peserta didik melalui harmonisasi olah hati, olah rasa, olah pikir dan olah raga dengan melibatkan dan kerjasama antara satuan pendidikan, keluarga dan masyarakat sebagai bagian dari Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM). Peraturan ini bertujuan untuk membangun dan membekali peserta didik sebagai generasi emas Indonesia Tahun 2045 dengan jiwa Pancasila dan pendidikan karakter yang baik guna menghadapi dinamika perubahan di masa depan.
  - 2) Kekurangan yaitu Peraturan mengenai pendidikan karakter di perguruan tinggi itu sendiri tidak semua perguruan tinggi menerapkan sistem pendidikan karakter disetiap mata kuliah ataupun program kemahasiswaan. Aturan tersebut tidak dilaksanakan dengan baik, masih banyak perguruan tinggi tidak menerapkan mengenai pendidikan karakter padahal pendidikan karakter sangat penting untuk membentuk sikap dan sifat peserta didik menjadi seseorang yang lebih sopan, disiplin, tanggungjawab, taat pada aturan, santun, dan sebagainya
- b. Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Pasal 1 Tahun 2003. Undang-Undang Nomor 12 Pasal 1 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Pasal 1 beberapa ketentuan dalam Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi diubah menjadi ketentuan Pasal 28 Ayat(4) dan Ayat(5). Peraturan Pemerintah Nomor 4 Pasal 4 Ayat (1) Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.

**Saran**

Berdasarkan hasil pembahasan diatas dengan adanya penelitian hukum ini, Penulis berharap :

- a. Untuk Pemerintah, bahwa peraturan mengenai pendidikan karakter yang diatur di dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1 dan Peraturan Presiden Nomor 87 Pasal 1 Ayat (1) Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter belum dilaksanakan dengan baik oleh seluruh perguruan tinggi yang ada di Indonesia. Oleh karena itu, dianjurkan adanya sanksi hukum bagi perguruan tinggi yang tidak menerapkan program mata kuliah mengenai pendidikan karakter apabila adanya sanksi hukum maka seluruh perguruan tinggi yang ada di Indonesia akan membuat program mata kuliah mengenai pendidikan karakter.
- b. Untuk perguruan tinggi, adanya kesadaran diri dalam perguruan tinggi untuk menerapkan program mata kuliah mengenai pendidikan karakter agar menciptakan peserta didik yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berkepribadian luhur, sehat, berilmu dan cakap, kritis, kreatif, inovatif, mandiri, percaya diri dan berjiwa wirausaha serta toleran, peka sosial dan lingkungan, demokratis dan bertanggung jawab.
- c. Untuk peserta didik, adanya perubahan dalam kehidupan di dalam ataupun di luar kampus menjadi pribadi yang baik, taat pada aturan, menciptakan prestasi yang baik dan menjaga nama baik almamater.



## Daftar Pustaka

### Buku :

- Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Amirullah Syarbini. *Buku Pintar Pendidikan Karakter; Panduan Lengkap Mendidik Karakter Anak di Sekolah, Madrasah dan Rumah*. (Jakarta: As@-Prima Pustaka, 2012).
- Berkowits, 2002, *The science of character education*, Hoover Institution Press.
- Fadjar Malik, 2004, *Sintesa Antara Perguruan Tinggi dengan Pesantren; Upaya Menghadirkan Wacana Pendidikan Alternatif*, Malang: UIN Press
- Faturrohman, Pupuh, dkk. 2013. *Pengembangan Pendidikan Karakter*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Jhony Ibrahim, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia, Hlm. 392
- Muhammad In'am Esha, 2006, *2 Tahun Universitas Islam Negeri Malang; Reorientasi Budaya Akademik Perguruan Tinggi*, Malang: UIN Press
- Muslich, Mansur. 2013, *Pendidikan Karakter Menjawab tantangan Krisis Multidimensional*, Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Peter Mahmud Marzuki, 2009, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Mulia, Hal. 41
- Samani, Muchlas dan Hariyanto, 2011, *Konsep dan Model Pendidikan Karakter*, Bandung: PT Remaja Rodakarya.
- Satjipto Rahardjo, 1996, *Hukum dalam Perspektif Sejarah dan Perubahan Sosial dalam Pembangunan Hukum dalam Perspektif Politik Hukum Nasional*, Rajawali Press, Jakarta, Hlm. 19
- Syamsul Kurniawan, 2013, *Pendidikan Karakter: Konsepsi dan Implementasinya secara Terpadu di Lingkungan Keluarga, Sekolah, Perguruan Tinggi dan Masyarakat*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1985, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Pers, Hlm. 52
- Soetanto Hendrawan, 2012, *Pendidikan Karakter*, Malang: Universitas Brawijaya.
- Zubaedi. *Desain Pendidikan Karakter: Konsepsi dan Aplikasinya dalam Lembaga Pendidikan*. (Jakarta: Kencana, 2011). Hlm. 17

**Jurnal :**

e Jurnal Undwi, Volume 28, Nomor 2, Oktober 2016

Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra, Volume 7, Nomor 2, Januari 2018.

Jurnal Pelangi, Volume 9, Nomor 2, Juni 2017

Syukri, *Peran Pendidikan di Perguruan Tinggi Terhadap Perubahan Perilaku Kaum Intelektual (Sosial Individu)*, Jurnal Ilmiah Kreatif, 4 (1), 1-15, Tahun 2009

Tadris, Volume 13, Nomor 1, Juni 2018.

**Peraturan Perundang-Undangan :**

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi

Undang-Undang Nomor 12 Lampiran II Petunjuk Nomor 211 tahun 2011.

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen

INPRES Nomor 1 tahun 2010 dalam Bidang Pendidikan mengenai Penguatan Metodologi dan Kurikulum

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi

Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi

Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi